

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam Pengentasan Kemiskinan

Nuryanto¹, Beti Kartiningrum², Muhammad Prihatislam Primadi³, Kristin Ayu Rambu Pindi⁴, Tri Nugroho⁵, Sri Widayanti⁶

¹ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia.

² Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia.

³ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia.

⁴ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia.

⁵ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia.

⁶ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia.

Informasi Artikel: Submit: September 2022, Revisi: Oktober 2022, Diterima: November 2022

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v6i2.243>

Abstract: *This study aims to analyze the problems that arise during the implementation of the poverty alleviation strategy in Pacitan Regency by the Pacitan Regional Government from the perspective of the Regional Government, Village Government and the community. This research is a qualitative descriptive analysis research with a natural background for phenomena that occur with various research methods. This study uses primary data sources obtained directly through interviews and observation and secondary data sources through books and archives of the Pacitan Regional Government. The results of the study show that the Pacitan Regional Government's efforts to alleviate poverty have various program policies such as; SIKAB TAJI PRIMA, Padat Karya Tunai, Gerbang Emas Pacitan, and Gerbang Intan are still immature, so they are constrained by various kinds of problems until there is no realization. The benefits felt by the community regarding the mission alleviation policies from the Regional Government in Pacitan Regency are still very minimal so that many people criticize these semi-finished policies.*

Keywords: *Poverty, Pacitan, Local Government, Village Government, Community.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang timbul selama pelaksanaan strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pacitan oleh Pemerintah Daerah Pacitan dilihat dari perspektif Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian analisis kualitatif deskriptif dengan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan berbagai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapat secara langsung melalui wawancara dan observasi dan sumber data sekunder melalui buku dan arsip Pemerintah Daerah Pacitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Daerah Pacitan dalam mengentaskan kemiskinan memiliki berbagai program kebijakan seperti; SIKAB TAJI PRIMA, Padat Karya Tunai, Gerbang Emas Pacitan, dan Gerbang Intan masih belum matang sehingga terkendala berbagai macam masalah sampai kenihilan realisasi. Manfaat yang dirasakan masyarakat terkait kebijakan pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Daerah di Kabupaten Pacitan masih sangat minim sehingga masyarakat banyak yang mengkritisi kebijakan-kebijakan setengah jadi tersebut.

Kata kunci: Kemiskinan, Pacitan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat.

*Corresponding author: Nuryanto

E-mail address: Nuryanto@gmail.com

The content of this website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license. Creative Commons License.

PENDAHULUAN

Kabupaten Pacitan memiliki luas wilayah 1389,87 Km² dengan 85% kondisi tanahnya adalah perbukitan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pacitan berupa bukit, jurang terjal serta

deretan pegunungan, termasuk Pegunungan Seribu. Walaupun sebagian besar wilayahnya berupa perbukitan, masyarakat Kabupaten Pacitan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Hasil tani yang menjadi orientasi petani Kabupaten Pacitan adalah padi, kacang tanah, dan kedelai. Wilayah Pacitan yang berbatasan dengan laut dari Samudera Hindia membuat mayoritas pekerjaan kedua masyarakat Pacitan adalah nelayan. Meskipun mayoritas masyarakatnya adalah petani dan nelayan, potensi yang sedang di tingkatkan oleh Pemerintah Daerah saat ini adalah potensi di sektor pariwisata dengan mengundang investor dari berbagai negara mulai dari Australia sampai Swiss.

Tercatat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, jumlah warga miskin di Kabupaten Pacitan berjumlah 84.190 jiwa atau sebesar 15,11% dari masyarakat Kabupaten Pacitan. Kabupaten Pacitan dengan angka kemiskinan tersebut menempati peringkat 8 dengan persentase kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Pacitan dalam upayanya mengentaskan kemiskinan memiliki beberapa kebijakan yang salah satunya diklaim sebagai inovasi Daerah. Kebijakan inovatif tersebut adalah SIKAB TAJI PRIMA. SIKAB TAJI PRIMA adalah sistem informasi berbasis aplikasi web dalam jaringan sebagai sarana pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai produsen data dan untuk meningkatkan pelayanan publik. Selain bertujuan sebagai peningkatan pelayanan publik, aplikasi tersebut bertujuan menampung aspirasi masyarakat dari berbagai Desa sehingga kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Daerah bisa tepat sasaran.

Kabupaten Pacitan selain dengan SIKAB TAJI PRIMA juga memiliki program unggulan untuk menurunkan angka kemiskinan. Program unggulan tersebut adalah Program Padat Karya Tunai. Melalui penjelasan oleh Bapak AB 1, Padat Karya Tunai adalah program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat tingkat Desa dengan menggalakkan tenaga-tenaga lokal untuk memanfaatkan potensi alam diberbagai sektor secara mandiri. Sikap gotong royong diharapkan dapat dipegang teguh oleh masyarakat Desa untuk mewujudkan Desa-Desa yang mandiri.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan tidak hanya memiliki 2 kebijakan sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Kebijakan lain yang dimaksud adalah Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas) Pacitan dan Gerakan Membangun Insan Pacitan (Gerbang Intan). Inovasi-inovasi tersebut adalah inovasi terdahulu Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sampai pada akhirnya tidak dilanjutkan disebabkan, menurut Bapak AB 3,

terkendala terkait regulasi sehingga inovasi Gerbang Emas dan Gerbang Intan tidak memiliki kekuatan regulasi untuk terus bertahan.

Ketidak sinerginya Pemerintah Daerah dengan masyarakat antara sektor yang digalakkan oleh Pemerintah Daerah dengan mayoritas pekerjaan masyarakat Kabupaten Pacitan merupakan deteksi awal bahwa ada miskordinasi diantara kedua belah pihak. Sebuah hal yang mengejutkan bagi kelompok kami mengingat kebijakan strategi inovatif dari Pemerintah Daerah (SIKAB TAJI PRIMA) bertujuan menampung aspirasi masyarakat. Berdasarkan pemaparan materi tentang SIKAB TAJI PRIMA dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Pacitan menjelaskan bahwa kendala-kendala yang dihadapi terkait aplikasi tersebut berupa aplikasi belum stabil, proses memuat situs (*loading*) yang lambat, jaringan internet di desa belum stabil, kurangnya komitmen Perangkat Daerah dalam integrasi data, serta operator yang sering berganti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis kualitatif deskriptif, dengan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan berbagai metode penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didapat secara langsung melalui wawancara dan observasi. Selain itu kami menggunakan sumber data sekunder melalui buku dan arsip Pemerintah Daerah Pacitan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan wawancara informan, observasi keadaan sebenarnya di lapangan, serta mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi yang relevan, dan faktual, sehingga diperoleh data-data penting yang dapat diolah dan dikaji. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menelaah hasil wawancara, observasi serta kepustakaan yang sesuai dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data hasil penelitian yang didapat menyatakan bahwa:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam upayannya mengentaskan kemiskinan memiliki berbagai macam strategi kebijakan dengan berbagai

macam kendala pula, seperti; SIKAB TAJI PRIMA, Padat Karya Tunai, Gerbang Emas Pacitan, dan Gerbang Intan.

2. Kendala-kendala teknis terkait kebijakan SIKAB TAJI PRIMA dalam mencapai visinya mengentaskan kemiskinan masyarakat, yaitu; aplikasi yang masih belum stabil sehingga sering crash, kecepatan koneksi internet yang belum maksimal, kurangnya komitmen perangkat daerah untuk mengembangkan kualitas aplikasi, sampai operator aplikasi yang dijalankan oleh pihak ketiga yang sering berganti menghasilkan aplikasi tambal-sulam.
3. Belum meratanya proses pendataan masyarakat Kabupaten Pacitan pada aplikasi SIKAB TAJI PRIMA sehingga bantuan-bantuan serta pembangunan dari Pemerintah Daerah pun belum merata yang mana mengakibatkan muncul kesenjangan antara masyarakat sudah terdata dan belum terdata. Belum meratanya proses pendataan adalah dampak dari kendala-kendala teknis aplikasi.
4. Program Padat Karya Tunai yang diunggulkan oleh Pemerintah Daerah Pacitan masih sebatas anjuran dan himbauan sehingga pada pelaksanaannya kurang memiliki dampak yang maksimal.
5. Tidak ada sinergisitas antara Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa serta Masyarakat mengakibatkan masing-masing pemerintah terkesan bekerja sendiri secara tidak maksimal.
6. Dampak dari berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan bisa dikatakan masih minim. Tercatat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, jumlah warga miskin di Kabupaten Pacitan berjumlah 84.190 jiwa atau sebesar 15,11% dari masyarakat Kabupaten Pacitan. Kabupaten Pacitan dengan angka kemiskinan tersebut menempati peringkat 8 dengan persentase kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur.
7. Kendala-kendala terkait kebijakan pengentas kemiskinan yang dihadapi menurunkan efektifitas sehingga masyarakat pun hampir tidak menikmati dampak yang signifikan dari kebijakan tersebut. Manfaat yang seharusnya dapat dirasakan akhirnya tidak sampai kepada masyarakat.

Pembahasan

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan penduduknya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan (Cahyat et al., 2007). Kemiskinan adalah masalah “lumrah” yang harus dihadapi dan diatasi oleh negara di seluruh penjuru dunia, terlebih di negara berkembang sampai tertinggal.

Negara Indonesia, khususnya di Kabupaten Pacitan, kemiskinan merupakan masalah besar yang sudah mengakar karena dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pacitan tetap saja kemiskinan masyarakat sana masih tinggi. Angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan tercatat sekitar 14,54 persen dengan nilai rata-rata PDRB Kabupaten Pacitan pada periode 2018-2021 hanya sebesar Rp. 9,263.48 Milyar (Aziz Zain, 2022). Angka tersebut jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Timur masih rendah, belum lagi kita berbicara Pulau Jawa bahkan sampai ke tingkat Nasional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan adalah:

- 1) Pengaruh kultur masyarakat Indonesia, dan khususnya di Kabupaten Pacitan, yang senang disebut miskin.
- 2) Natalitas masyarakat Kabupaten Pacitan tergolong tinggi. Tercatat menurut BPS, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Pacitan ada di angka 5,54%.
- 3) Kualitas sumber daya manusia yang rendah karena masyarakat di Kabupaten Pacitan yang berpendidikan lebih memilih untuk merantau. Berdasarkan BPS serta wawancara kami dengan beberapa warga Pacitan yang tidak bisa kami sebutkan namanya (salah satunya Pak MJ). (BPS Kabupaten Pacitan 2022)

Berdasarkan hasil diskusi yang diperkuat dengan data dari BPS Kabupaten Pacitan tahun 2022, kemiskinan yang diderita masyarakat Kabupaten Pacitan tergolong ke dalam kemiskinan kultural. Akar permasalahan kemiskinan yang tertanam sangat dalam di Kabupaten Pacitan sudah sampai mempengaruhi kondisi sosial masyarakat Pacitan. Kemiskinan Kultural adalah kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha untuk memperbaiki dari pihak lain yang membantunya (Bhinadi, 2017).

Pengaruh kultur masyarakat Indonesia yang senang disebut miskin menyebabkan strategi pengentasan kemiskinan sulit dicapai. Mengingat ketika status sosial suatu keluarga dikategorikan “miskin”, maka Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada keluarga tersebut dan siapa yang tidak senang dibantu bukan?

Walaupun tergolong ke dalam Kemiskinan Kultural, namun kami menelusuri lebih dalam untuk mencari bibit terciptanya akar kemiskinan tersebut. Strategi-strategi pengentasan kemiskinan Kabupaten Pacitan terdeteksi masih memiliki banyak sekali kekurangan dan kelemahan. Strategi setengah jadi dan terkesan tambal-sulam membuat Pemerintah Daerah Pacitan menjadi perspektif yang kami bahas.

Pemerintahan menurut Sutoro Eko dalam jurnalnya yang berjudul “*Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan*” mendefinisikan *government* adalah *supreme authority* dalam arena pemerintahan seperti negara. Pemerintahan bukan pemimpin, penguasa, birokrasi, negara, atau sektor publik. Pemerintahan adalah institusi pemegang kedaulatan rakyat bersama parlemen. Secara epistemologis, berbicara pemerintahan tidak bisa dengan pendekatan legal formal dengan ala sarjana hukum, bukan juga memandang sebagai perangkat statis seperti dilakukan oleh institusionalisme dalam dalam ilmu politik. (Yunanto 2021). Pemerintahan adalah pihak pemilik kuasa secara sumber daya dan birokrasi untuk membantu masyarakatnya yang mengalami kesulitan, termasuk kesulitan ekonomi.

Menurut Kepala Desa Watukarung, Ibu W, Pemerintah Daerah tidak memberikan bantuan sama sekali ketika Desa Watukarung melakukan pembangunan Pantai Watukarung, Pantai Kasap, dan Pantai Jantur. Sebanyak 80% Dana Desa digunakan untuk pengembangan Pantai-Pantai tersebut. Secara mengejutkan melalui survei yang dilakukan kelompok kami bahwa Pantai Jantur secara permanen sudah ditutup kemungkinan karena kurangnya perhatian baik dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Tutupnya salah satu pantai di Desa Watukarung merupakan tamparan keras bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa bahwa koordinasi yang sinergis sangat diperlukan untuk berkembangnya Pendapatan Asli Daerah yang kemudian sejalan dengan tingkat kemiskinan yang akan menurun.

Kasus krisis koordinasi antar lini pemerintahan mulai dari pemerintahan daerah sampai masyarakat di Kabupaten Pacitan menurut kelompok kami perlu dikembalikan lagi kepada pemerintah pusat sebagai pembina dan pengawas daerah. Apalagi dengan istilah desentralisasi masa kini yang sedang *trend* menjadi keluhan daerah-daerah di Indonesia adalah “*Kepala*

sudah diberikan tetapi ekornya masih di pegang". Regulasi-regulasi yang mengekang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi kepada daerahnya masing-masing terus saja menjadi keluhan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan penuh kepada tiap Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk mengurus segala urusan pemerintahan. Pemerintah pusat membatasi kewenangannya terhadap pemerintah daerah sebatas sebagai pembina dan pengawas. Walaupun kewenangan penuh telah diberikan, seluruh kewenangan yang dimiliki Daerah harus bertujuan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat dan lingkungan. Sehingga segala kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah Daerah harus berlandaskan tujuan mensejahterakan masyarakat daerah tersebut.

Kewenangan Daerah dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit 40% dari total belanja APBD guna mengurangi kemiskinan. Lebih lanjut Pemerintah Pusat mengatur penggunaan pajak dan retribusi Daerah untuk mempertimbangkan pengentasan kemiskinan yang disebut dalam kebijakan makroekonomi Daerah.

Peraturan Bupati (Perbup) Pacitan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah mengatur penggunaan Dana Desa untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa dengan kegiatan yang menunjang sektor:

- a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
- b. Restoran dan wisata desa
- c. Perdagangan logistik pangan
- d. Perikanan
- e. Peternakan
- f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

Kemandirian Desa dalam membangun dan mensejahterakan masyarakatnya diharapkan, menurut bapak AB 1, dapat menarik investor-investor asing. Desa sebagai jembatan antara

Pemerintah Daerah dengan investor dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga program pembangunan pengentasan kemiskinan dapat terealisasi dengan baik.

Pada pelaksanaannya ketika kami melakukan observasi ke Kabupaten Pacitan, kami mewawancarai masyarakat Kota Pacitan yang sedang menyelenggarakan festival budaya di sekitar kantor Pemerintahan Daerah Pacitan serta Pak MJ salah satu warga Desa Watukarung sekaligus mantan Kepala Desa Watukarung tahun 1990-an. Informasi yang kami dapatkan dari hasil wawancara menyebutkan bahwa pelaksanaan program Padat Karya Tunai yang diserukan oleh Pemerintah Daerah Pacitan tidak terlihat sama sekali. Padat Karya Tunai, menurut Bapak AB 1, yang merupakan program unggulan dalam mengentaskan kemiskinan hanya sebatas anjuran tanpa ada realisasi program. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026 (Pemerintah Kabupaten Pacitan 2021) tidak mencantumkan Padat Karya Tunai sebagai program yang akan dianggarkan pada 5 tahun kedepan. Hal ini semakin menguatkan asumsi kami bahwa program Padat Karya Tunai di Kabupaten Pacitan belum memiliki bukti apapun sebagai program pengentasan kemiskinan yang sudah terealisasi. Ketika program nya belum ada maka manfaat bagi masyarakat pun pasti tidak akan ada.

Pemerintahan adalah hal ikhwal pemerintah, yakni pemerintah sebagai gagasan, institusi, perbuatan pemerintah, dan fungsi-fungsi pemerintah (Yunanto 2021). Prinsip aksiologis dan idealisme harus mencakup pemerintahan secara luas baik ditingkat Desa, Daerah, dan Pusat. Konsep ini menegaskan bahwa pemerintah (Pusat, Daerah, dan Desa) bukan hanya seputar mengkaji negara tetapi perbuatan pemerintah, interaksi pemerintah dengan berbagai aktor dalam tatanan visi mensejahterakan masyarakat.

Sistem informasi dan teknologi informasi, tidak hanya berperan sebagai suatu dukungan semata, namun juga telah berperan sebagai *key operational, high potential*, peran strategis dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam sebuah organisasi (Wheelen 2004). SIKAB TAJI PRIMA sebagai strategi inovatif Kabupaten Pacitan untuk mengentaskan kemiskinan bergerak di bidang Teknologi dan Informasi memang perlu banyak perkembangan baik dari *learning by mistake* atau mempertimbangkan naskah akademik dari akademisi yang melakukan penelitian-penelitian terkait kebijakan pembuatan aplikasi tersebut. Istilah meng-elektronik-kan pemerintahan yang sudah berkembang di Daerah-Daerah seluruh Indonesia menggunakan nama *e-Government*. *E-Government* secara

umum dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan penyampaian layanan (Tri Nugraha 2018). Ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan menggunakan Teknologi Informasi sebagai sarana untuk menjalankan strategi pengentasan kemiskinan, maka kematangan dari berbagai sisi baik dari; sumber daya, operator teknis, dan sosialisasi kepada masyarakat harus dipertimbangkan secara matang sehingga efektivitas, transparansi, dan sinergisitas dapat tercapai.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 166 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Kabupaten di Kabupaten Pacitan, SIKAB TAJI PRIMA dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan data dan informasi daerah yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan dalam rangka percepatan penganggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan. Sebagai penunjang pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pacitan, SIKAB TAJI PRIMA memiliki visi mengentaskan kemiskinan masyarakat. Melalui Perbup No. 116 Tahun 2021, kebijakan inovatif Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan diharapkan mampu menanggulangi masalah kemiskinan Daerah tersebut.

SIKAB TAJI PRIMA sebagai penampung aspirasi masyarakat, yang pada pelaksanaannya tidak maksimal, bisa dialih fungsi atau mungkin dikembangkan menjadi situs penyimpanan arsip laporan bagi investor pengembang pariwisata sehingga transparansi dapat tercipta dan masyarakat sendiri bisa menilai. Sektor privat tidak hanya melulu melaporkan keuangan tetapi juga mendengarkan keluhan masyarakat yang tinggal di daerah pengembang pariwisata. Masalah lingkungan dan sosial yang ditimbulkan harus diatasi oleh pemilik dan penanam saham perusahaan tersebut.

Masih banyak yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Pacitan untuk menyempurnakan penerapan *e-Government*, seperti; memberikan pelatihan dan pendampingan oleh tenaga ahli kepada SDM di instansi Pemerintah Daerah, penambahan server untuk meningkatkan keamanan *e-Government*, sosialisasi kepada masyarakat umum tentang program *e-Government*. Hal tersebut bukan membuat penerapan *e-Government* yang sempurna menjadi mustahil, tetapi hendaknya menjadi faktor motivasi untuk Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Pacitan untuk bergerak bersama-sama sehingga masalah

kemiskinan bisa teratasi.

KESIMPULAN & SARAN

Upaya pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pacitan berbentuk program-program kebijakan seperti; SIKAB TAJI PRIMA, Padat Karya Tunai, Gerbang Emas Pacitan, dan Gerbang Intan yang masih belum matang sehingga terkendala dengan berbagai macam masalah mulai dari masalah teknis sampai kehilangan realisasi dari program tersebut. Manfaat yang dirasakan masyarakat terkait kebijakan pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Daerah di Kabupaten Pacitan masih sangat minim. Masyarakat banyak yang mengkritisi kebijakan-kebijakan setengah jadi tersebut terkait tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam mengembangkan program-program kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pacitan.

Terkait dengan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dapat di kategorikan belum maksimal di karenakan belum ada nya program yang tepat sasaran dan hanya berfokus pada program SIKAB TAJI PRIMA yang di nilai program tidak maksimal karena selain berbagai kendala teknis yang dihadapi tidak memungkinkan seluruh masyarakat dapat mengakses. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan harus meningkatkan peran sebagai koodinator dan fasilitator dalam pengentasan kemiskinan melalui program atau pun kebijakan dengan pengefisienan program dengan tindakan seperti melihat dan memberdayakan potensi yang ada seperti pantai dan potensi lain nya. Hal ini dapat di lakukan dengan cara pengembangan pusat seni budaya dan pariwisata dan segala prasarana harus di persiapkan baik infrastuktur maupun SDM.

Untuk manfaat yang dirasakan masyarakat belum maksimal sehingga perlu memerlukan tindakan dari pemerintah daerah pacitan seperti peningkatan sarana kesehatan, peningkatan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur jalan karena infrastruktur masih kurang memadai dan mengakibatkan jarak tempuh ke daerah pacitan memakan waktu yang lama. Kemudian pengembangan sistem informasi yang dapat di jangkau dan memudahkan seluruh masyarakat dan untuk pengentasan kemiskinan harus melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan upaya pengentasan kemiskinan mulai dari perencanaan maupun pelaksanaan nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Zain, I. A. (2022). Analisis Sektor Unggulan Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pacitan Tahun 2018-2021. *Journal Economic and Strategy*, 3.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat* (1st ed.). Deepublish.
- BPS Kabupaten Pacitan. 2022. *Kabupaten Pacitan Dalam Angka 2022*. Pacitan: BPS Kabupaten Pacitan.
- Cahyat, A., C. Gonner, and M. Haug. 2007. *Mengkaji Kemiskinan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan Dengan Contoh Dari Kutai Barat, Indonesia*. Bogor: Center of International Forestry Research.
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Pemerintah Kabupaten Pacitan. 2021. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pacitan 2021-2026*. Pacitan: Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Tri Nugraha, Joko. 2018. "E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman)." *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media* 2: 32–42.
- Wheelen, T. L.; Hunger, J. D. 2004. *Strategic Management and Business Policy: Concepts*. New Jersey: Pearson Education.
- Yunanto, Sutoro Eko. 2021. "Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan." *Governabilitas* 2.
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 166 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Kabupaten di Kabupaten Pacitan